



**Yayasan Pendidikan Bung Hatta**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang  
E-mail: [fpik@bunghatta.ac.id](mailto:fpik@bunghatta.ac.id) Website: [www.fpik.bunghatta.ac.id](http://www.fpik.bunghatta.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 302 a/SK/FPIK/IV-2021

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-269-2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka dengan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Suparno, M.Si	Staf Pengajar FPIK

Untuk menjadi **Anggota Tim Validasi Bidang Kelautan** Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Padang  
Pada Tanggal : 21 April 2021  
Dekan,

**Ir. Arlius, MS., Ph.D**

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660-269-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan validasi KLHS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- b. melakukan validasi KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.



- KEEMPAT** : Kepada anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan jasa pembahasan dokumen daerah spesifikasi: vakasi/verifikasi dokumen daerah lainnya untuk setiap kali pembahasan/validasi/verifikasi/rapat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai peraturan perundang-undangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi di Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 April 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta,  
C.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/lembaga bidang di Padang;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-269-2021

TANGGAL : 20 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menugaskan tim pembinaan dan validasi untuk melakukan validasi KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota</li> <li>2. Memimpin rapat validasi KLHS</li> <li>3. Mengoreksi dan menandatangani berita acara rapat validasi KLHS</li> <li>4. Mengoreksi rumusan konsep persetujuan validasi KLHS</li> <li>5. Menerbitkan Persetujuan Validasi KLHS</li> <li>6. Menandatangani pengumuman persetujuan validasi KLHS</li> <li>7. Menandatangani surat-surat /administrasi proses validasi KLHS</li> </ol>
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris	Membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi, proses administrasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS
3.	Desrizal, ST, M.Si	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dari anggota sekretariat dan penanggung jawab materi</li> <li>2. Memfollow up ke tim pembuat/penyusun KLHS terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaklengkapan administrasi</li> <li>- Pelaksanaan rapat validasi</li> <li>- Pengumuman persetujuan validasi KLHS</li> <li>- Permasalahan Validasi lainnya terkait dengan dokumen KLHS</li> </ul> </li> <li>3. Mengkoreksi konsep berita acara rapat validasi</li> <li>4. Mengoreksi konsep notulen rapat validasi</li> <li>5. Mengoreksi konsep risalah validasi</li> </ol>

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				<p>6. Mengoreksi konsep surat hasil pemeriksaan perbaikan KLHS</p> <p>7. Mengoreksi konsep surat persetujuan validasi KLHS</p> <p>8. Mengoreksi konsep pengumuman persetujuan validasi KLHS</p> <p>9. Membuat atau mengoreksi konsep surat-surat/ administrasi lainnya terkait proses validasi KLHS</p> <p>10. Melakukan pembinaan KLHS</p>
4.	Firdaus Arifin, S.Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perencanaan Pembangunan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perencanaan pembangunan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
5.	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Kebencanaan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kebencanaan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
6.	Ir. Palastri, M.Eng	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perencanaan Wilayah & Kota dan Tata Ruang	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perencanaan wilayah & kota dan tata ruang terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
7.	Rivo Armis, ST, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perikanan dan Kelautan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perikanan dan kelautan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
8.	Sri Murni, ST.Sp	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pengelolaan sumber daya air terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
9.	Inzuddin, ST, MT	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Energi/ Pertambangan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang energi/pertambangan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Jusmalinda, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Kehutanan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kehutanan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
11.	PM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
12.	Yumel Eqia, MM, Akt	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perhubungan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perhubungan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
13.	Yoga Alham, A.Md.LLAJ	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perhubungan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perhubungan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
14.	PM	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang pariwisata	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pariwisata terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
15.	Ade Efdira, SS	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Sosial Masyarakat	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang sosial masyarakat terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
16.	Yenni Asrida, SP, MM	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Pertanian/ Perkebunan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pertanian/ perkebunan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
17.	Ir. Yuwarsyah Abidin, MP	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Penyediaan Pangan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang penyediaan pangan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
18.	Darman, ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Industri dan Perdagangan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang industri dan perdagangan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
19.	Ir. Nasrizal, MM	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang koperasi dan usaha kecil menengah terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
20.	PM	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Kesehatan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kesehatan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
21.	Fadil, S.Kom, MM	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Pendidikan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pendidikan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
22.	Adek Putra, SAP	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Kependudukan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kependudukan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
23.	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Tenaga Kerja	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang ketenaga kerjaan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
24.	Sukarma, SE	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim Validasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
25.	PM	PSLH UNAND	Anggota Tim Validasi bidang Pencemaran Air	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pencemaran air terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
26.	PM	PSLH UNAND	Anggota Tim Validasi bidang Pencemaran Udara	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pencemaran udara terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
27.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	PSL Universitas Bung Hatta	Anggota Tim Validasi bidang	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian



NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			Pembangunan Berkelanjutan	dibidang pembangunan berkelanjutan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
28.	PM	Ahli Pertanian UNAND	Anggota Tim Validasi bidang Pertanian	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pertanian terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
29.	Eko Subrata, S.Hut, M.Hut	Ahli Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Kehutanan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kehutanan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
30.	Dr. Ir. Badrul Mustafa Kemal, D.E.A.	Ahli Kebencanaan UNAND	Anggota Tim Validasi bidang Kebencanaan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kebencanaan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
31.	Rizki Aziz, S.T.,M.T.,Ph.D.	Ahli Persampahan UNAND	Anggota Tim Validasi bidang Pengelolaan Sampah	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pengelolaan sampah terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
32.	H. Khairul Azmi, S.Par	Ahli Pariwisata	Anggota Tim Validasi bidang Kepariwisata	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kepariwisataan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
33.	Ir. Andy Ikhvan, ME	Ahli Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota Tim Validasi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pengelolaan sumber daya air terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
34.	PM	Ahli Ekonomi Pembangunan UNAND	Anggota Tim Validasi bidang Ekonomi Daerah	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang ekonomi daerah terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
35.	PM	Ahli Perencanaan Wilayah Universitas Bung Hatta	Anggota Tim Validasi bidang Perencanaan Wilayah	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perencanaan wilayah terhadap muatan laporan

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
36.	Dr. Ir. Suparno, M.Si	Universitas Bung Hatta	Anggota Tim Validasi bidang Kelautan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang kelautan/perairan laut terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
37.	Dr. Indang Dewata, M.Si	PPKLH Universitas Negeri Padang	Anggota Tim Validasi bidang Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang daya dukung daya tampung lingkungan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
38.	Dr. Ir. Firman Hidayat, M.Si	PSLH Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang pengelolaan daerah aliran sungai terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
39.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Validasi bidang Perizinan/ Persetujuan Lingkungan	Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian dibidang perizinan/persetujuan lingkungan terhadap muatan laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota
40.	Andi Irawan, ST, MT	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	- Anggota Tim Validasi terkait Metodologi KLHS - Anggota Tim Pembinaan	1. Memberikan masukan, saran, tanggapan dan pendapat secara teknis sesuai keahlian terkait metodologi laporan KLHS yang dibuat/disusun oleh kabupaten/kota 2. Melakukan pembinaan KLHS
41.	Novriyanti, ST, M.Si	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	- Anggota Tim Validasi/ Penanggung jawab Materi - Anggota Tim Pembinaan	1. Melakukan uji administrasi laporan KLHS 2. Membuat konsep surat kelengkapan/ ketidaklengkapan administrasi
42.	Rosa Gustilisa, ST	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat		3. Membuat konsep undangan rapat validasi KLHS 4. Membuat konsep berita acara rapat validasi KLHS 5. Membuat konsep notulen rapat validasi KLHS
43.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat		6. Membuat konsep risalah rapat validasi dan surat pengantarnya 7. Menerima dan mengecek kelengkapan risalah/ laporan KLHS perbaikan

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				8. Membuat konsep surat hasil pemeriksaan perbaikan laporan KLHS 9. Memeriksa laporan perbaikan secara keseluruhan 10. Membuat konsep persetujuan validasi KLHS 11. Membuat konsep pengumuman persetujuan validasi KLHS 12. Mengumumkan permohonan Izin Lingkungan ke web site dan menempelkan pengumuman di papan pengumuman DLH 13. Membuat konsep surat-surat/administrasi lainnya terkait proses validasi KLHS 14. Melakukan pembinaan KLHS
44.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat</li> <li>- Anggota Tim Pembinaan</li> </ul>	1. Mengumpulkan masukan/saran/ tanggapan peserta rapat pada saat rapat validasi KLHS 2. Mengkonfirmasi peserta rapat yang akan hadir pada saat rapat melalui telpon/wa 3. Membuat konsep berita acara rapat validasi KLHS jika penanggung jawab materi berhalangan hadir 4. Membuat konsep notulen rapat validasi jika penanggung jawab materi berhalangan hadir 5. Membuat konsep risalah rapat validasi dan surat pengantarnya jika penanggung jawab materi berhalangan hadir
45.	Sosliati	Staf Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat</li> <li>- Anggota Tim Pembinaan</li> </ul>	1. Meminta nomor surat keluar/undangan/persetujuan validasi/pengumuman/surat pengantar/dan surat lainnya ke bagian umum
46.	Feri Aldi	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat		2. Memperbanyak dan menyerahkan ke bagian umum untuk mendistribusikan surat/undangan/dokumen/surat pengantar dan surat-surat lainnya 3. Memberikan tanda terima setiap surat/ dokumen/ risalah rapat dan lain-lain yang diterima oleh tim penyusun KLHS.

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				4. Mencatat jadwal rapat di bagian umum 5. Memeriksa dan memastikan kelengkapan rapat seperti microphone, proyektor, dll 6. Menyiapkan daftar hadir rapat 7. Mengelola konsumsi dan honorarium



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI